

Workshop Percepatan Penyusunan Peta Rencana Tata Ruang di Provinsi Jawa Barat.



Suasana Workshop Percepatan Penyelesaian Peta RTR

Percepatan penyelesaian rencana tata ruang menjadi salah satu program prioritas nasional. Penyusunan rencana tata ruang dalam pelaksanaan pemetaannya wajib dikonsultasikan oleh setiap pemerintah daerah kepada BIG. Berdasarkan data pelaksanaan konsultasi peta tata ruang di BIG, masih banyak wilayah yang belum mampu menyelesaikan peta tata ruang sesuai standar. Ketidakmampuan dalam menyelesaikannya terutama disebabkan keterbatasan sumberdaya manusia dan ketersediaan informasi geospasial dasar dan informasi geospasial tematik yang diperlukan dalam pemetaan tata ruang masih terbatas.

Dalam rangka program percepatan penyelesaian peta rencana tata ruang, Bidang Pemetaan Tata Ruang BIG bekerjasama dengan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat melaksanakan *Workshop Percepatan Penyusunan Peta Rencana Tata Ruang*. Kegiatan *workshop* berlangsung pada tanggal 11-12 Desember 2017, bertempat di Hotel Grand Tjokro Bandung. Pelaksanaan kegiatan *workshop* di Jawa Barat merupakan yang ketiga kali pada tahun ini. *Workshop* percepatan sebelumnya sudah berlangsung pada Oktober dan November 2017 bertempat di lokasi yang sama. Kegiatan *workshop* hari pertama dihadiri

oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran, Purwakarta, Cirebon, dan Bekasi, sedangkan peserta *workshop* hari kedua berasal dari Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Ciamis, dan Indramayu.

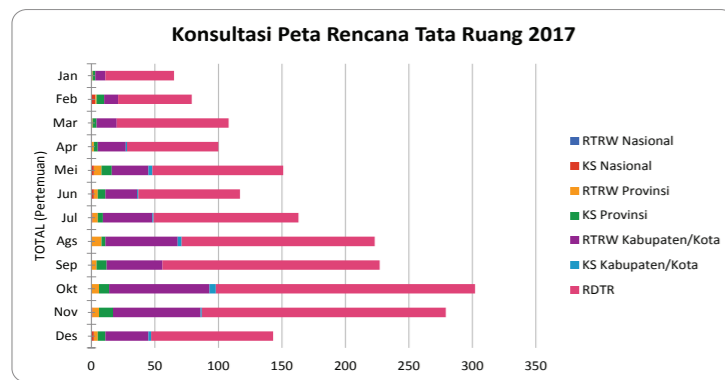
Pelaksanaan *workshop* dibuka oleh Ryan Pribadi ST mewakili Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas BIG. Dalam sambutannya, BIG menekankan bahwa kegiatan *workshop* percepatan model ini akan tetap dilanjutkan tahun depan dengan berkoordinasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk berperan aktif, sehingga pelaksanaan konsultasi peta rencana tata ruang ke depan dapat berlangsung secara rutin setiap bulan. Harapan besar juga disampaikan kepada pemerintah kabupaten/kota agar memanfaatkan secara optimal forum *workshop* ini, terutama untuk mempercepat penyelesaian permasalahan pelik aspek-aspek pemetaan tata ruang.

Workshop ini dihadiri oleh Bapak Hendra Wardhana, ST, MT yang mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan informasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sejak tanggal 29 November 2017 Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Jawa Barat secara resmi dibubarkan oleh Gubernur. Tugas dan fungsi yang melekat pada BKPRD dilimpahkan ke Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR). Pembubaran BKPRD Provinsi Jawa Barat di satu sisi menyebabkan permasalahan baru karena forum ini masih sangat dibutuhkan untuk koordinasi tata ruang, sehingga kedepannya akan dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD). Kehadiran BIG ke daerah dalam upaya menjemput bola merupakan sebuah kegiatan yang sangat bermanfaat bagi pemerintah kabupaten/kota. Kecenderungan bertambahnya jumlah Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) yang akan disusun oleh setiap pemerintah kabupaten/kota, menjadikan *workshop* percepatan dan optimalisasi fungsi koordinasi penataan ruang daerah menjadi sangat penting untuk dapat dilaksanakan secara reguler. [Iman Sadesmeli, 2017]

Data Asistensi dan Supervisi Peta Tata Ruang Periode Januari - 20 Desember 2017

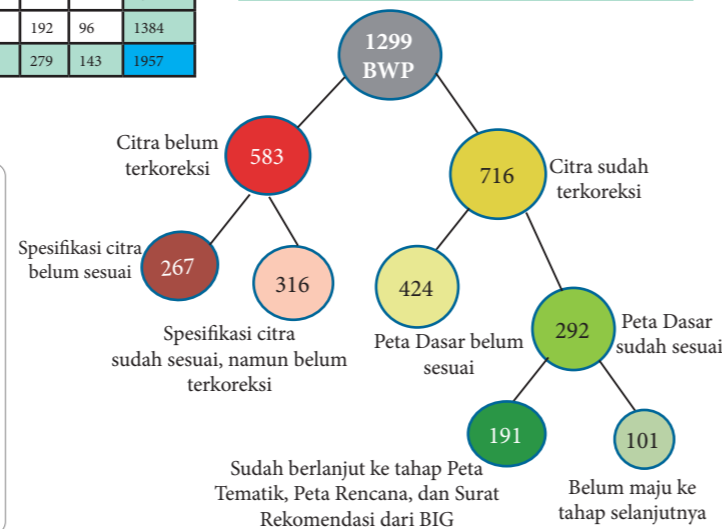
Jenis Supervisi	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Total	
RTR Umum	RTRW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	RTRWP	1	1	1	2	6	3	4	8	4	6	5	3	44
	RTRWK	8	11	16	22	29	25	39	57	44	79	69	34	433
RTR Rinci	KSN	0	3	0	0	2	2	1	0	0	0	1	2	11
	KSP	2	6	3	3	8	6	4	3	8	8	11	6	68
	KSK	0	0	0	1	3	1	1	3	0	5	1	2	17
	RDTR	54	58	88	72	103	80	114	152	171	204	192	96	1384
Total	65	79	108	100	151	117	163	223	227	302	279	143	1957	

Kompilator Data: Marhensa Aditya Hadi, 2017



PROGRES ASISTENSI & SUPERVISI PETA TATA RUANG

Penjabaran Capaian Asistensi dan Supervisi Peta RDTR 2015-2017



TATA RUANG & ATLAS NEWSLETTER

MEDIA INFORMASI PEMETAAN TATA RUANG, DINAMIKA SUMBERDAYA DAN ATLAS

CATATAN BERANDA

Alhamdulillah, itulah ucapan yang keluar saat kami diminta menulis catatan beranda untuk newsletter edisi Desember 2017, yang juga merupakan edisi akhir di tahun 2017. Tanpa terasa sudah lebih dari satu tahun newsletter tata ruang dan atlas ini terbit, tepatnya sejak edisi pertama bulan September 2016. Sejak itu secara rutin dewan redaksi yang juga merupakan tim kreatif PPTRA mengemas berbagai kegiatan dari sekian banyak yang dapat ditampilkan pada newsletter ini. Sampai akhirnya, awal Desember 2017, semua edisi newsletter ini terpublikasikan via laman BIG.

Tentu ada suka dan duka dalam mengelolala sebuah newsletter, bahan berlimpah namun tetap diperlukan usaha untuk meramu menjadi tulisan yang singkat dan enak dibaca. Ternyata itu bukan pekerjaan yang mudah, kami masih perlu proses dan belajar bagaimana menata waktu sekaligus menjadi materi tulisan ringkas yang baik. Tetapi kami yakin dari berbagai kesulitan, pasti ada kemudahan. Berbagai upaya telah kami lakukan, termasuk mengadakan kursus penulisan bagi tim redaksi dan alhamdulillah kegiatan ini sudah kami lakukan beberapa kali.

Patut disyukuri juga disela-sela menyiapkan terbitan newsletter ini, sebagian tim redaksi juga melakukan asistensi dan supervisi peta tata ruang yang merupakan tupoksi kami. Bahkan tanpa sadar sampai bulan Desember 2017 tim teknis kami sudah melayani dan bertemu dengan pemerintah daerah sebanyak 2000 kali. Artinya bila dikaitkan dengan sosialisasi, maka asistensi peta tata ruang yang kami

lakukan adalah sarana sangat efektif, efisien dan tepat sasaran dalam mengkampanyekan pemanfaatan Informasi geospasial di daerah. Kita paham, tata ruang penting sebagai panglima pembangunan, mengawal peta tata ruang yang akurat, *update* dan dapat dipertanggungjawabkan substansinya merupakan pekerjaan mulia. Masyarakat menunggu peta tata ruang dan perlu waktu cepat. Oleh karena itu, sampai tahun 2019 percepatan asistensi dan penyusunan peta tata ruang tetap merupakan program prioritas di PPTRA.

Tugas lain yang tidak kalah pentingnya adalah integrasi neraca sumberdaya alam terutama pada kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan dukungan atas kajian pengembangan wilayah pada wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan pendekatan spasial dinamis. Kegiatan ini akan terus dilakukan sampai 2019 dan mengambil peran yang cukup penting, sejalan dengan permintaan Bappenas untuk menyusun buku III RPJM 2019-2024.

Demikian pula pemetaan sosial. Saat ini kami sudah menggandeng Kementerian Sosial untuk melakukan kerjasama dalam menyiapkan peta aktual atau peta khusus untuk para disabilitas (tuna netra) dan tentu saja pembangunan *e-atlas* yang diharapkan sudah mulai stabil dan tersosialisasikan di periode program 2018. Akhirul kalam selamat jalan tahun 2017 dan selamat datang 2018. Kami merasa belum banyak berbuat di tahun 2017 dan berharap akan terus berkarya di tahun 2018. Insyallah. Ganbarimasu [Mulyanto Darmawan, 2017]

ISU STRATEGIS & INFO KEBIJAKAN

Secara umum pemetaan kelompok sosial di BIG sangat kecil persentasenya (kurang dari 10%) dibandingkan dengan kelompok pemetaan non sosial. Oleh karena itu, keberadaan dan kontribusinya sering terabaikan. Beberapa pemetaan sosial yang pernah disusun antara lain Atlas Taktual untuk penyandang disabilitas netra, Atlas Junior untuk anak-anak usia prasekolah hingga anak Sekolah Dasar. Atlas Sejarah yang disusun melibatkan pakar sejarah dan ditampilkan menarik untuk umum.

Pada tahun 2017 ini disusun Atlas Pendidikan terdiri dari 19 tema sesuai dengan kurikulum SMP bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu juga disusun Atlas Bentanglahan Kalimantan yang menampilkan bentanglahan dan kondisi sosial budaya. Sebelumnya juga telah disusun Atlas Bentanglahan Pulau Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Atlas ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber materi bahan ajar bagi sekolah menengah tingkat atas maupun perguruan tinggi minat kebumihuan. Output/produk atlas dan pemetaan sosial yang telah dibuat oleh BIG dapat langsung digunakan oleh masyarakat sebagai wahana pembelajaran terkait informasi spasial, baik secara perorangan maupun kelompok, dan secara formal maupun informal.

Tahun 2018 akan dilakukan kegiatan pemetaan sosial untuk mendukung Program Penanggulangan Kemiskinan. Kegiatan ini termasuk dalam Program Prioritas Nasional, dimana sesuai tusi BIG dapat berkontribusi khususnya pada pemenuhan Program Prioritas

(PP) terkait Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran. Pada PP tersebut terdapat 5 kegiatan yang telah ditetapkan yaitu penyaluran bantuan pangan non tunai, jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, bantuan pendidikan bagi anak usia sekolah, subsidi energi tepat sasaran, dan penguatan bantuan tunai bersyarat. Dari ke 5 kegiatan dalam PP tersebut, BIG berkontribusi dengan menyusun kegiatan yang hasilnya dapat digunakan untuk mendukung ke-5 kegiatan yang ada di PP tersebut melalui kegiatan berbasis spasial dan temporal.

Untuk arah kajian ke depan, pemetaan sosial berbasis spasial dan temporal masih sangat terbuka luas dan masih banyak tema yang bisa dikaji. Dataset sosial ekonomi yang berasal dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, dan lainnya cukup banyak tersedia. Namun belum banyak yang dioptimalkan melalui kegiatan dan kajian berbasis spasial dan temporal. Beberapa permasalahan sosial terkait kependudukan, seperti analisis rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya tingkat pendapatan, kesenjangan sosial, dan yang sejenis dapat dikaji lebih dalam. Hal lain yang perlu dikaji adalah permasalahan terkait kejahatan yang ada di masyarakat seperti penyalahgunaan narkoba, bencana sosial akibat konflik sosial, permasalahan lingkungan seperti pencemaran, kebakaran, fasilitas umum, bahkan permasalahan sosial dikaitkan dengan politik. Pemecahan permasalahan tersebut perlu mendapat dukungan analisis sosial berbasis spasial dan temporal. [Niendyawati, 2017]



Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi :

PUSAT PEMETAAN TATA RUANG DAN ATLAS
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
Gedung F Lantai 2
Jl. Raya Jakarta-Bogor Km 46, Cibinong, Bogor

Telp - PPTRA : (021) 8764613
Fax - PPTRA : (021) 8764613
Email : redaksi.pttra@gmail.com
Twitter : @pttra_big

REDAKSI:

| Penanggung Jawab : Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas | Tim Redaksi: Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas |
| Editor: Fakhruddin Mustofa, Sri Eka Wati, Roswidyatmoko D., Randhi Atiqi, Marhensa Aditya Hadi, Chintia Dewi, Rakyana Paksi, Rochmad Budi S.,
I Made Dipta S. | Desain Tata Letak: Ika Rosalika |

Kota Probolinggo Terima Surat Rekomendasi Peta RTRW dari BIG



Penyerahan Surat Rekomendasi Peta RTRW Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur

POTRET
Kegiatan

Peta Taktual Wilayah NKRI, Kado Istimewa BIG di Hari Disabilitas Internasional



Peta Taktual Wilayah NKRI



Mensos Mencermati Atlas Taktual

Kota Probolinggo merupakan kota terbesar keempat di Jawa Timur setelah Surabaya, Malang dan Kediri. Terletak 100 km sebelah tenggara Surabaya, Kota Probolinggo berbatasan dengan Selat Madura di sebelah utara serta Kabupaten Probolinggo di sebelah timur, selatan, dan barat. Kota ini terus berbenah terutama untuk mengatur fungsi-fungsi ruang kotanya melalui RTRW.

Pada akhir tahun 2016, Bappeda Kota Probolinggo memulai proses asistensi dan supervisi dalam rangka revisi RTRW Kota Probolinggo. Setelah beberapa kali melakukan asistensi, akhirnya pada bulan Desember tahun 2017 Bappeda Kota Probolinggo memperoleh surat rekomendasi yang langsung diterima oleh Kepala Bappeda Budiono Wirawan, S.Sos, M.Si. Rekomendasi diberikan BIG melalui Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas Dr. Ir. Mulyanto Darmawan, M.Sc.

Pemberikan rekomendasi melalui acara pleno yang berlangsung pada sore hari berjalan lancar terutama pada proses uji dan padu serasi. Tidak terdapat kesalahan mengenai padu serasi antara peta dasar dengan peta tematik serta peta rencana dan kelengkapan informasi geospasial lainnya. Selain itu juga dilakukan review untuk album peta serta uji petik terhadap rancangan peraturan daerah. RTRW Kota Probolinggo cukup istimewa karena sudah dilakukan penyelarasan dengan RZWP3K terkait batas garis pantai yang juga dikonsultasikan ke Pusat Kelautan Lingkungan dan Pantai. Harapan ke depan, semua Kabupaten/Kota/Provinsi yang sedang melakukan revisi RTRW juga melakukan koordinasi penyelarasan tata ruang dengan Dinas Kelautan dan Perikanan setempat. [Chintia Dewi, 2017]

media peta adalah 185 cm x 100 cm dengan skala peta 1:3.500.000. Bagian tepi peta dihias dengan bingkai berukir dengan lebar 15 cm. Proses cetak peta menggunakan metode tata "kentheng".

Peta taktual tersebut diserahkan oleh Sekretaris Utama BIG, Titiek Suparwati dan Deputy Bidang Informasi Geospasial Tematik, Nurwadjadi, kepada Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa. Prosesi penyerahan dikemas dalam pertunjukan drama teatrikal yang mengangkat cerita Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang. Dalam sambutannya, Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi kontribusi BIG dalam peringatan HDI tahun ini. Dia menyatakan bahwa peta taktual wilayah NKRI adalah salah satu bentuk sumbangan yang sangat substantif bagi para penyandang disabilitas, khususnya disabilitas netra. Peta taktual tersebut adalah simbol komitmen pemerintah yang hendak menyelenggarakan pembangunan sesuai dengan agenda global *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang mengusung prinsip *no-one left behind*.

Tidak berhenti sampai di situ, pada saat meninjau *stand* BIG yang menampilkan beberapa atlas taktual, globe taktual, dan produk BIG lainnya, Khofifah menyampaikan ketertarikannya membuat MoU dengan BIG dalam hal pemanfaatan informasi geospasial bagi penyandang disabilitas netra. MoU diharapkan dapat terlaksana pada tahun 2018. Rencana terkait MoU tersebut akan dilaporkan langsung kepada Presiden RI. [Randhi Atiqi & Sugeng Murdoko, 2017]

Pemerintah menggelar Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) di Candi Prambanan pada tanggal 2 Desember 2017. Peringatan HDI tahun ini secara internasional bertema "*Transformation Towards Sustainable and Resilient Society for All*", sementara secara nasional bertema "Menuju Masyarakat Inklusif, Tangguh, dan Berkelanjutan". Acara ini dihadiri oleh para penyandang disabilitas dari berbagai daerah, Menteri Sosial RI, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, dan pejabat terkait lainnya.

Dalam kesempatan ini, BIG ikut berpartisipasi dengan menyerahkan peta taktual wilayah NKRI yang dikhususkan bagi para penyandang disabilitas netra. Peta ini merupakan peta timbul dari bahan tembaga yang dilengkapi keterangan dengan huruf braille. Ukuran

BIG, sebagai instansi yang memiliki tupoksi untuk menyediakan informasi geospasial baik dasar maupun tematik, berkewajiban untuk mengintegrasikan keempat neraca sumberdaya alam tersebut agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas, khususnya sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan pembangunan secara lebih komprehensif.

Pada tanggal 14 Desember 2017, bertempat di Swiss Belresidences Kalibata, PPTRA menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) dalam rangka pemantapan dokumen integrasi neraca sumberdaya alam yang telah disusun. Dalam FGD kali ini, K/L yang merupakan walidata untuk empat komponen sumberdaya diminta untuk mereview dan memberikan masukan atas dokumen dimaksud. Diskusi yang dipimpin oleh Prita Brada Bumi, S.Si, M.Sis berlangsung menarik dan menelurkan cukup banyak kritik dan saran yang membangun bagi penyempurnaan dokumen integrasi neraca.

Kehadiran Drs. Nyoto Suwignyo, M.Si selaku Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Kementerian Dalam Negeri makin menambah semarak suasana. Beliau menyampaikan tanggapan dari sudut pandang kebijakan, khususnya terkait pentingnya neraca sumberdaya alam. Lemahnya regulasi yang mengatur setiap pemerintah daerah untuk menyusun neraca sumberdaya alam serta keterbatasan anggaran yang dimiliki daerah dilihat sebagai tantangan bagi pemerintah pusat untuk dapat mencari solusi terbaik. Manfaat besar yang terkandung dalam neraca sumberdaya alam harus dapat dipahami oleh daerah tanpa harus membebani daerah dengan formulasi yang rumit dalam menyusun neraca dan mengintegrasikannya. [Sri Eka Wati, 2017]

Pemantapan Dokumen Integrasi Neraca Sumberdaya Alam



Sesi Foto Bersama

Neraca sumberdaya alam merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengetahui status sumberdaya alam dari waktu ke waktu, baik terkait potensi/cadangan, pemanfaatan, serta tingkat kerusakannya. Neraca empat komponen sumberdaya alam, yaitu lahan, hutan, air, dan mineral batubara telah dipetakan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (neraca penatagunaan tanah), Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (neraca hutan), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (neraca air), dan Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (neraca mineral dan batubara).

Data neraca empat komponen sumberdaya alam memang telah tersedia, namun proses integrasi neraca antar komponen sumberdaya belum pernah disusun. Data neraca tersebut masih diaplikasikan secara terpisah-pisah terkait kepentingan sektoral. Menyikapi hal tersebut,

70 Instruktur Nasional Kurikulum 2013 Ikuti Uji Keterbacaan Peta dan Atlas



Peserta Uji Keterbacaan Peta dan Atlas



Paparan Kepala BIG

Sebanyak 70 peserta mengikuti kegiatan *Workshop Uji Keterbacaan Peralatan/Media Pembelajaran IPS* berupa peta dan atlas. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Mega Anggrek, Jakarta pada tanggal 5-8 Desember 2017, diikuti oleh insan pendidikan yang berasal dari unsur dosen Pendidikan Geografi, guru-guru mata pelajaran (mapel) IPS tingkat SMP, dan wakil dari Dinas Pendidikan kabupaten/kota. Semua peserta merupakan Instruktur Nasional Kurikulum 2013 khususnya IPS. Asal atau alamat peserta cukup bervariasi, dapat dikatakan mewakili region Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua. Kegiatan ini diprakarsai oleh Direktorat Pembinaan SMP, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan Badan Informasi Geospasial.

Workshop Percepatan Penyelesaian Peta RTR di Daerah Istimewa Yogyakarta



Suasana Workshop Percepatan Penyelesaian Peta RTR

Mengingat kebutuhan pelaksanaan asistensi dan supervisi peta rencana tata ruang yang semakin banyak, BIG dalam hal ini Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas berinisiasi bekerjasama dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan percepatan pelaksanaan asistensi dan supervisi. Kegiatan *workshop* berlangsung selama tiga hari pada tanggal 6-8 Desember 2017, bertempat di Hotel Grand Aston dan Hotel Sahid Rich Yogyakarta.

Workshop dibuka oleh Ryan Priyadi, S.T. selaku Kepala Bidang Pemetaan Tata Ruang, BIG. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan pentingnya percepatan dalam penyelesaian Peta RTR sehingga kegiatan-kegiatan yang sifatnya percepatan akan tetap dilaksanakan pada tahun 2018. Di samping itu, kegiatan *workshop* juga merupakan bentuk dorongan bagi Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah DIY untuk berperan aktif dalam pelaksanaan konsultasi penyusunan Peta RTR sehingga kegiatan yang serupa dapat rutin diselenggarakan. Selain itu, kegiatan *workshop* menjadi wadah yang memberikan kesempatan bagi pemerintah kabupaten/kota melaksanakan konsultasi dan mempercepat penyelesaian peta-peta RTR yang sedang disusun.

Peserta yang menghadiri *workshop* adalah OPD dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, dan turut hadir juga dari Kabupaten Klaten. Peta Rencana Tata Ruang yang dikonsultasikan dalam *workshop* ini terdiri atas Peta RTRW, RDTR, KSK, dan KSP. Berdasarkan hasil pembahasan dalam pelaksanaan konsultasi, capaian rata-rata pembuatan Peta RTR adalah pada tahap peta dasar. Selain itu, terdapat beberapa RTR yang pembuatan petanya sudah sampai pada tahap peta rencana. [Rochmad Budi Santoso, 2017]

Aktivitas uji keterbacaan bertujuan untuk menguji tingkat keterbacaan dan kevalidan 17 peta tematik untuk pendidikan dan 2 atlas (wilayah dan sejarah) yang akan digunakan sebagai media pembelajaran peserta didik tingkat SMP. Setiap peserta *workshop* menelaah aspek-aspek peta dan atlas dikaitkan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar tingkat SMP atau kelas VII-IX. Setiap peta tematik untuk pendidikan dan atlas juga ditelaah dan diteliti tingkat keterbacaannya dikaitkan dengan psikologi perkembangan peserta didik SMP. Sebagai contoh, pewarnaan peta perlu diperhatikan. Selain tetap memenuhi kaidah kartografi, pewarnaan yang baik dan sesuai dengan perkembangan peserta didik akan berpengaruh pada daya serap untuk memahami informasi peta dan atlas. "Pada akhirnya belajar peta dan atlas akan sangat mengasyikkan", demikian salah satu komentar peserta.

Kehadiran Kepala BIG, Prof. Dr. Hasanuddin Z Abidin di tengah-tengah suasana *workshop* sangat disyukuri oleh semua peserta. Presentasi Kepala BIG selama kurang lebih 1 jam 30 menit dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, diikuti sangat antusias oleh semua peserta dan menambah semangat para guru dalam mengajarkan informasi geospasial terintegrasi dalam pelajaran IPS. Prof Hasan, demikian beliau biasa dipanggil, menekankan bahwa aspek keruangan dan geografi sangat penting untuk dipahami oleh peserta didik, tidak terbatas bagi mapel IPS tetapi juga untuk mapel IPA. Aspek keruangan harus dipahami dan dimengerti oleh semua elemen peserta didik agar sadar bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar. [Fakhrudin Mustofa, 2017]

ROH DAN CITRA KOTA Peran Perancangan Kota sebagai Kebijakan Publik

RESENSI BUKU

"Kota adalah bukan hanya sesuatu bentuk yang fisik, formal, dan morfologis; kota mengandung institusi-institusi yang menggambarkan suatu tempat yang diharapkan untuk kehidupan. Institusi-institusi menyatukan dan merekat hubungan individu-individu, kelompok dan lingkungan fisik yang mengakomodasi mereka (Norman Crowe)". Kalimat yang menggambarkan pengertian kota tersebut merupakan salah satu kutipan yang disampaikan oleh penulis pada bagian pengantar bukunya.

Penulis membagi bukunya menjadi 6 bagian, yaitu bagian 1: Jiwa dan Kota, bagian 2: Bentuk Kota, bagian 3: Kebijakan Publik, bagian 4: Perancangan Kota, bagian 5: Perancangan Kota Sebagai Kebijakan Publik, dan bagian 6: Pasang Surut Perkembangan Kota Indonesia.

Bagian pertama menyampaikan garis besar pengertian kota dan karakteristik unsur-unsur yang mengisinya. Bagian kedua menjelaskan unsur-unsur yang mendelineasi bentuk kota, termasuk sifat dasar dan karakteristiknya. Selanjutnya terkait pengertian, peran, dan produk perancangan kota sebagai kebijakan publik diulas pada bagian ketiga. Untuk bagian keempat, penulis menguraikan sifat dasar dan karakteristik perancangan dalam konteks peran perancangan kota dibahas seberapa besar pengaruh perancangan kota terhadap bentuk fisik kota. Sementara pada bagian kelima, penulis membahas tentang ideologi, konsep dasar atau risalah-risalah perancangan kota yang berasal dan digunakan oleh masyarakat di negara Barat maupun Timur. Sedangkan untuk bagian akhir yaitu bagian keenam, disampaikan penjelasan mengenai peran perancangan kota dan perkembangan bentuk kota di Indonesia dari masa kota awal sampai dengan kota masa kini.

Dengan uraian-uraian teori serta kajian yang disampaikan oleh penulis secara komprehensif, buku ini patut menjadi referensi bagi para mahasiswa di bidang arsitektur, perencana, dan perancang kota; dosen, peneliti, maupun pemerhati kota; serta bagi para perencana, perancang kota, arsitek, pengembang, dan pengambil keputusan. [Rochmad Budi Santoso, 2017]

Judul Buku : ROH DAN CITRA KOTA
Peran Perancangan Kota sebagai Kebijakan Publik
Penyusun : Bambang Heryanto
Penerbit : Brilian Internasional, Surabaya bekerjasama dengan Jurusan Arsitektur Fakultas Universitas Hasanuddin, Makassar.
Tahun : 2015